

Martiniana Pasrin

by UNITRI PRESS

Submission date: 17-Jan-2022 02:05AM (UTC-0500)

Submission ID: 1742872764

File name: Martiniana_Pasrin.docx (24.91K)

Word count: 2999

Character count: 19558

Martiniana Pasrin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021. Wacana dan Konstruksi Pemberitaan Intoleransi di Metro TV Tentang Penggunaan Jilbab Bagi Siswi Non Muslim di SMKN 2 Padang

Dosen Pembimbing Utama : Akhirul Aminullah, S.Sos., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Fathul Qorib, S.I.Kom., M.Ikom

RINGKASAN

Konstruksi dan wacana berbeda kerap mewarnai media massa dalam memberitakan isu-isu tertentu termasuk dalam memberitakan isu keagamaan. Hal ini menarik, yang kemudian membuat pertanyaan seberapa berpengaruh isu intoleransi di tengah keberagaman Indonesia untuk diberitakan di media termasuk kasus aturan wajib hijab bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat konstruksi dan wacana yang dibangun dalam video pemberitaan di Metro TV yang mengangkat tentang kasus intoleransi di SMKN 2 kota Padang dan untuk mengetahui relasi kekuasaan media terhadap wacana pemberitaan di Metro TV.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan analisis teks model Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Dalam melakukan analisis wacana kritis, van Dijk telah merumuskan tiga dimensi bangunan yaitu analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang berisi dialog antara presenter dan narasumber, *capture* video pemberitaan dan sebagainya.

Analisis Wacana Kritis menggambarkan dimensi teks pada video pemberitaan Metro TV secara umum tentang ideologi yang dibangun secara berbeda. Presenter, Wahyu Widodo dan Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda sepakat kasus intoleransi ini perlu ditangani secara serius. Sementara Mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar menolak aturan direvisi dan menawarkan keuntungan menggunakan hijab. Pada kognisi sosial yang disorot adalah bagaimana wartawan membawakan wacana pemberitaan. Terakhir, pada konteks sosial menyoroti kasus intoleransi berdasarkan batasan yang terdapat dalam UUD dan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan narasumber.

Kata kunci: wacana kritis, Metro TV, Van Dijk

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada sejarah komunikasi, jurnalisme dilihat sebagai pemasok utama kebutuhan orang untuk bisa berkomunikasi. Pers dalam peranannya terlibat dalam pemikiran dan adu argumen guna melihat struktur sosial yang seperti apa untuk menciptakan situasi kondusif di tengah berlangsungnya kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara (Oetama, 2001:431). Karena media telah menjadi bagian penting dalam pembentukan cara pikir, sikap, tindakan sekaligus kebutuhan dasar hidup manusia (Epafras, 2016:18). Lebih lanjut Luhmann dalam (Karmida, 2017:5) melihat bahwa apapun pengetahuan kita terhadap masyarakat atau dunia yang kita tempati kita mengetahuinya dari media massa. Itu berarti dalam masyarakat kita, pengetahuan kita akan bergantung pada pemberitaan media. Karena media massa berperan membawa luas pesan yang bisa mempengaruhi pikiran masyarakat yang mengkonsumsi berita tersebut (Junaedi, 2007:13). Sayangnya, peristiwa yang menjadi berita ternyata banyak dipengaruhi pemahaman wartawan sendiri tentang apa yang perlu ditonjolkan dan tidak, atau apa yang dianggap oleh wartawan tersebut layak dan tidak diketahui oleh pembaca, pendengar atau pemirsa yang tidak melihat peristiwa itu secara langsung (Oetama, 2001: xix).

Dalam pemberitaan media, realitas bisa saja dikonstruksi. Sehingga apa yang ditawarkan media bisa saja fakta yang telah disaring yang mana yang harus ditonjolkan atau fakta mana yang harus dibuang. Hal ini dibenarkan seperti penuturan (Eriyanto, 2002:17) bahwa realitas tidak terjadi secara alamiah, maupun tidak diturunkan langsung dari Tuhan, akan tetapi dibentuk dan dikonstruksi dalam media. Donald Shaw *dkk* dalam (Junaedi, 2007:95) menyebut bukti-bukti penting telah terkumpul yang menunjukkan bahwa editor dan penyiar berperan penting dalam membentuk kenyataan atau instruksi sosial melalui pemilihan berita yang ditampilkan. Sehingga bagaimana media memberitakan peristiwa atau kejadian tertentu akan berpengaruh bagi opini publik, baik persoalan ekonomi, pendidikan, industri hingga konstruksi isu keagamaan yang telah masuk *agenda setting* media.

Televisi yang menjadi bagian dari media massa, dianggap paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Televisi sebagai salah satu sarana jurnalistik berbentuk audio visual bisa menampilkan beberapa aspek seperti aspek verbal, visual dan gramatikal yang memungkinkan isu-isu tertentu diangkat ke publik secara lengkap (Oramahi, 2015:6). Sehingga tidak mengherankan jika menjamurnya stasiun TV baik lokal hingga nasional yang diikuti dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas, memperlihatkan jika TV masih tetap eksis di tengah

gempuran media baru. Karena para kreatif di industri TV selalu mengeksplorasi juga menemukan formula baru dalam menayangkan program berkualitas (Suprihono, 2019). Kehadiran media baru diketahui tidak menghilangkan eksistensi televisi sebagai media konvensional. Hal tersebut terungkap melalui penelitian yang dilakukan Nielsen dalam (Sari, 2016) yang mengungkap bahwa masyarakat pada umumnya masih meminati TV berkat karakter TV yang praktis akan informasi atau hiburan yang ditampilkannya.

Kehadiran internet di tengah pertumbuhan televisi tidak membuatnya mati. Justru keduanya berkolaborasi untuk lebih menjangkau banyak orang. Sehingga tayangan di televisi dapat ditemukan di berbagai platform, atau yang disebut sebagai konvergensi. Konvergensi tersebut juga memudahkan peneliti untuk melihat siaran ulang pemberitaan tentang kasus intoleransi di SMKN 2 Padang di *platform* youtube masing-masing *channel* televisi. Penggiat media menilai bahwa kehadiran konvergensi merupakan *multiplatform* konglomerat media. Jika sebelumnya media terfokus pada satu wadah seperti cetak, radio, televisi maupun online, dengan kehadiran konvergensi memungkinkan cetak bisa bergabung dengan online dan sebagainya (Jenkins, 2006).

Sejak tahun 1922, Amerika Serikat dan Eropa melalui berbagai riset para ahli komunikasi mengungkapkan betapa media massa termasuk televisi dan media sosial mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membangun opini publik atau berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat (Agustin, 2019:4). Sehingga tidak heran lewat narasinya televisi mendefinisikan beberapa hal tertentu di hadapan penonton, seperti ²² siapa yang jadi pahlawan dan siapa yang jadi penjahat, apa yang bernilai bagi manusia, alasan yang masuk akal dan tidak, solusi tertentu yang harus ditinggalkan atau diambil dan apa yang berguna bagi manusia atau tidak (Mulyana, 2008:11).

Konstruksi yang dilakukan media salah satunya nampak pada penelitian yang dilakukan oleh Risa Karmida (2017) pada konstruksi realita “aksi damai” dalam pemberitaan isu keagamaan di Metro TV. Pada pemberitaan tentang aksi damai 212, Metro TV terkesan hanya ingin menampilkan sisi positif pada aksi tersebut, yaitu menonjolkan pada doa bersama yang damai. Melewatkan fakta yang lain seperti pada pidato penutup Jokowi usai sholat Jumat, suara Rizieq Shihab sedang memprovokasi massa terdengar untuk bersama-sama menyanyikan *yelling*, "Tangkap, tangkap si Ahok sekarang juga". Suara dan gambar video tersebut hanya muncul 5 detik sebelum kemudian pihak studio mematikan *natural sound* dari lapangan aksi dan segera mengirimkannya ke *angle* lain. Bahkan, sehari setelah aksi 212 beredar video amatir yang menunjukkan pengusiran terhadap Reporter Metro TV, Rifai Panome saat melakukan siaran langsung di lokasi. Hal ini merupakan imbas dari eksistensi Metro TV yang dianggap

mendukung Ahok, sebagai sikap politik Partai Nasdem yang menjadi sister-organization Metro TV (Karmida, 2017:7).

Konstruksi yang ditampilkan oleh Metro TV yaitu memberi gambaran positif tentang "aksi damai" yang berjalan tertib dan khidmat, sementara audiens tidak mengetahui realitas pertama yang terjadi di dunia nyata. Konstruksi yang dibangun oleh Metro TV bisa saja dianggap sebagai upaya memenuhi tanggung jawab sosial untuk menjaga kondusifitas dalam masyarakat. Padahal, tanggung jawab media tidak hanya sekedar seperti itu. Denis McQuail dalam (ibid;6) menegaskan bahwa jurnalisme publik dibuat dengan tujuan untuk menambal bolongnya kualitas *civil life*, yang jembatannya adalah melalui partisipasi juga debat yang ada di masyarakat.

Hal tersebut juga menarik perhatian peneliti dalam melihat bagaimana pemberitaan terhadap kasus intoleransi di channel Metro TV dihadirkan. Terlebih khusus pemberitaan pada video yang ramai diperbincangkan media. Video yang sedang viral tersebut menunjukkan adu argumen antara orangtua murid dengan pihak sekolah SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi non muslim mengenakan hijab, padahal sekolah tersebut berstatus sekolah negeri. Dalam video yang itu direkam pada Kamis (21/1/2021), terdengar percakapan antara orangtua Jeni dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Zakri Zaini. Zakri mengaku bahwa aturan tersebut berdasarkan aturan yang sudah ada sejak lama. Meski demikian Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang dan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat membantah adanya pemaksaan siswa untuk menggunakan jilbab di sekolah.

Sebelum fokus pada pemberitaan channel MetroTV dalam memberitakan kasus pemaksaan jilbab itu, peneliti juga melihat hal yang menarik di channel TV lain yang menayangkan kasus ini. Sebut saja, kuantitas pemberitaan di tvOne, MetroTV, Kompas TV, iNews TV dan CNN memiliki jumlah yang berbeda. Pemberitaan kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi non-muslim di tvOne berjumlah 4, MetroTV berjumlah 5, iNews TV berjumlah 2 sementara Kompas TV terhitung jauh dari media yang lain dalam memberitakan kasus ini yaitu 33 kali diberitakan. Tidak kalah mengejutkan CNN hanya memberitakannya sekali saja.

Berdasarkan hal tersebut peneliti lewat penelitian ini ingin lebih tahu apakah kuantitas ini juga menjadi bahan yang memungkinkan terjadinya konstruksi berbeda setiap media terhadap kasus intoleransi tersebut. Kasus keagamaan melalui hasil *research* yang dilakukan peneliti, menunjukkan media dalam fokusnya memberitakan isu keagamaan bahkan memiliki konsep yang berbeda. Hal ini menarik, yang kemudian membuat pertanyaan: seberapa penting isu intoleransi di tengah keberagaman agama, latar belakang atau ras untuk diberitakan di media? Dimana kehadiran media seharusnya bisa mengungkap penanganan intoleransi oleh

pemerintah atau kehadiran media sebagai pengawas kontrol sosial dibutuhkan agar masyarakat disadarkan akan *urgensinya* isu intoleransi bagi keberlangsungan hidup bernegara di tengah kemajemukan.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Benny Susetyo (2015) dengan judul "*Rekonstruksi Wacana Kuasa Presiden SBY dalam Merespon Kasus Intoleransi di Yogyakarta: Pemberitaan Harian Kompas Selama Mei-Oktober 2014*". Penelitian yang dilakukan oleh Susetyo menunjukkan bahwa memang masalah intoleransi beragama nyata di Indonesia. Intoleransi tidak hanya menyasar kepada umat muslim kepada non muslim, tetapi sesama umat muslim juga kerap terjadi. Kasus intoleransi yang bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat jika tidak ditangani dengan baik terlebih pemerintah sebagai pemberi kebijakan, akan terus merebak.

Apalagi hasil yang diungkap Benny melalui teks-teks pemberitaan Harian Kompas dari bulan Mei-Oktober 2014 menemukan fakta sosial pembiaran kekerasan, fakta hukum penegakan hukum yang lemah dan fakta tanggung jawab presiden SBY yang tidak konsisten terhadap kasus intoleransi di Yogyakarta. Fakta tersebut menunjukkan bahwa SBY tidak konsisten menjalankan konstitusi. Sehingga kasus intoleransi yang diteliti peneliti saat ini penting untuk muncul di permukaan agar dibicarakan bersama. Media yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isu intoleransi kepada masyarakat luas harus dianalisis apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Seperti apakah sudah bisa berimbang, adil, berupaya maksimal agar tidak terjadi disinformasi dan sebagainya. Terlebih, media harus bisa menjadi pembawa jurnalisme damai di tengah masyarakat.

Pemberitaan mengenai isu keagamaan memang tidak habis dibahas di Indonesia. Isu tersebut tidak hanya menyasar kepada kaum minoritas, tetapi juga kepada sesama agama dengan aliran berbeda dan motif lainnya. Hal tersebut tidak mengejutkan mengingat berdasarkan survei Wahid Foundation (2016) terungkap fakta jika intoleransi sesama muslim yang berbeda kelompok, memiliki selisih yang tidak jauh berbeda dengan intoleransi kepada umat non muslim. Intoleransi sesama Muslim mencapai 49 persen, sementara sebanyak 38,4 persen merupakan intoleransi kepada non-muslim.

Contoh intoleransi sesama agama sebut saja penganut Syiah di Jawa Tengah di tahun 2016 yang hendak mengadakan peringatan 10 Muharram atau biasa disebut Asyura mendapat penolakan dari berbagai kelompok yang menamai diri mereka Laskar Umat Islam. Lalu pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya menutup Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud setelah ada kecaman dari warga Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari. Kemudian kasus ini juga menyasar kepada seorang siswi muslim SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen yang diteror

dan diintimidasi sejak September 2019-Januari 2020 karena tidak mengenakan jilbab. Dia mendapat perlakuan tersebut dari pengurus Rohani Islam dan teman-teman di sekolahnya.

Sementara di sisi lain harus disayangkan kaum minoritas juga ternyata sering mengalami kasus intoleransi. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang atau yang disingkat ELSA (2018), terdapat 29 kasus intoleransi yang nampak ke permukaan. Jumlah kasus itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode tahun 2017. Meskipun tidak berbeda jauh dari kasus yang terjadi sebelumnya, kebanyakan kasus intoleransi diwarnai penolakan terhadap kegiatan berbasis agama. Seperti kasus penolakan, penghentian rumah ibadah, terorisme, dan kegiatan keagamaan yang dibubarkan. Lebih lanjut, pada tahun 2020 ELSA Semarang menemukan dua kasus yang berbau intoleransi di sekolah. Keduanya terkait pemaksaan mengenakan hijab dan penolakan calon seorang guru atas dasar agama.

Kasus intoleransi yang menasar di institusi pendidikan tentu saja menjadi keprihatinan bersama. Pendidikan yang sejatinya merupakan wadah anak-anak bangsa bertumbuh dan berkembang harus dirusak oleh hal-hal demikian (Kompas.com, 2021). Kasus intoleransi di sekolah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di semua media adalah kasus "pemaksaan" bagi siswi non-Muslim untuk memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Kasus tersebut terbuka ke publik berawal dari postingan Facebook seorang siswi yang bernama Jeni Cahyani Hia. Dia yang mengunggah surat pernyataan tidak bersedia mengikuti aturan memakai jilbab tersebut. Setelah viral, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengakui terdapat aturan pemaksaan tersebut terjadi di sekolah. Menyusul, Rusmadi menyampaikan permohonan maafnya.

Diketahui, sumber kewajiban jilbab di Padang tersebut berasal dari peraturan daerah berupa instruksi No.451.442/BINSOS-iii/2005 yang diberlakukan sejak 2005 pada zaman Walikota Padang Fauzi Bahar. Poin yang tertuang dalam perda tersebut yaitu mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di Sekolah Negeri Padang. Meskipun isinya ditujukan kepada siswi Muslim, ternyata dalam prakteknya di sekolah murid beragama lain juga diwajibkan memakai jilbab. Kejadian intoleransi di sekolah cukup memprihatinkan apalagi dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah negeri yang seharusnya menaruh nilai-nilai Pancasila dengan penghormatan terhadap nilai kebhinekaan sebagai falsafah hidup bernegara.

Sebagai sebuah isu keagamaan, media sangat berperan penting untuk membawa wacana tentang isu tersebut ke hadapan publik. Bagaimana media memberitakan isu keagamaan tergantung perspektif masing-masing media. Dengan keberagaman media serta ciri khasnya masing-masing hingga pengaruh kepemilikan media memungkinkan sebuah berita dikonstruksi berbeda oleh masing-masing media. Salah satunya bisa terjadi di pertelevisian

Indonesia yang saat ini sudah berkembang pesat. Selain TVRI yang merupakan stasiun TV tertua yang didirikan pada tahun 1962 sekaligus sebagai milik pemerintah, di era ini kita dapat menikmati berbagai stasiun TV yang lahir dari 1980-an hingga 2000-an, seperti RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, Metro TV, TVOne, Trans TV, Kompas TV, dan lainnya (Oramahi, 2015:vi).

Kepemilikan media akhirnya menentukan bagaimana media televisi mengkonstruksi berita yang ditampilkan. Dalam hal ini yang penting dalam lembaga bukan wartawan, bukan sutradara atau pemain film yang meneruskan pesan komunikasi melalui pemancar televisi melainkan pemilik. Itu berarti pemilik membayar mereka agar melaksanakan kemauannya baik dalam bentuk keragaman berita, film atau program televisi (Wiryanto, 2000:5). Pemilik media tersebutlah yang sesungguhnya mengendalikan jutaan penonton atau pembaca hingga pemakai internet.

Media massa dilihat sebagai arena pertarungan (*site of struggle*) dari berbagai macam kepentingan dan ideologi yang tumbuh dalam masyarakat (Junaedi, 2007:31). Sebagai contoh, jika terdapat konflik maka pihak-pihak yang terkait berkompetisi untuk mempengaruhi konstruksi sebuah berita agar mendapatkan dukungan publik bagi posisinya. Cara yang digunakan seringkali bukan dengan menawarkan fakta baru, tetapi dengan mengubah kerangka/dimensi interpretatif untuk mengevaluasi fakta, Pezzullo dalam (Agustin, 2019:110).

Melalui penelitian Rizky Taufiqurrahman (2018) dengan judul "Analisis Framing Dugaan Ahok Sebagai Tersangka Pada Kasus Penistaan Agama di Media Massa Metro Tv dan TV One, dia mengungkap bahwa faktor kepemilikan media bisa berpengaruh terhadap pemberitaan yang menjadi penentu isi pemberitaan sebuah berita yang diinformasikan kepada khalayak. Hasil penelitian Rizky menunjukkan bahwa Metro TV cenderung memberikan citra yang baik kepada Ahok dengan narasi-narasi yang menunjukkan bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu tidak berisi kata-kata yang menistakan umat islam. Sementara tvOne memberitakan sebaliknya. Yaitu Ahok dianggap bersalah dan harus meminta maaf kepada semua umat islam terkait pernyataannya tersebut.

Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya berikut ini memang tidak secara gamblang mengungkapkan kaitan kepemilikan media terhadap konstruksi yang dibangun. Akan tetapi dapat kita lihat keberpihakan media tertentu terhadap isu keagamaan memang nyata terjadi. Sebut saja isu keagamaan yang diangkat di INews TV bisa dilihat pada riset terhadap aksi 212 yang dilakukan oleh Muhammad Zaelani dan Septiawan K. Santana (2017). Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, INews TV mengkonstruksi Aksi Damai 212 dengan lebih 'mengagungkan' Jokowi dan sebaliknya, menyalahkan peserta aksi damai 212. INews TV telah

menunjukkan keberpihakannya kepada presiden. INews TV juga berperan melabeli peserta sebagai biang kerok masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

Konstruksi keagamaan juga dibangun di CNN melalui penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Robiatul Adawiyah (2020). India yang memiliki konflik Islam-Hindu menjadi fokus penelitiannya. Kasus keagamaan tersebut bermula saat Perdana Menteri Narendra Modi menyetujui UU Amandemen Warga Negara atau Citizenship Amendment Bill (CAB) sehingga menimbulkan perdebatan di publik terlebih khusus di India. Bagaimana tidak, UU CAB salah satunya mengenai kemungkinan imigran ilegal dari Afganistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan status kewarganegaraan, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang muslim.

Kericuhan terjadi ketika warga muslim yang menolak UU tersebut diserang oleh warga India beragama Hindu. Orang diserang berdasarkan agamanya tidak terelak lagi. Konstruksi yang dibangun CNN menanggapi kasus keagamaan tersebut adalah lebih fokus menawarkan dukungan dan solusi. Alternatif solusinya adalah versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terdapat juga labeling ekstrimisme dan terorisme terhadap umat muslim yang dilakukan oleh CNN.

Terakhir, Kompas juga melakukan konstruksi pada isu keagamaan lewat penelitian yang dilakukan oleh Novi Yanti Wulan Sari, Anisatul Afifa, Alya Nur (2019) dengan judul "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam Kompas TV". Hasil penelitian memperlihatkan konstruksi yang dibangun oleh Kompas TV adalah tidak berpihak atau netral. Hal itu ditunjukkan melalui narasumber dari beberapa pihak dengan agama terkait untuk memberikan pendapat atau solusi mengenai kasus Ustadz Abdul Somad.

Kompas TV pun cenderung tidak menyudutkan UAS selaku pihak terlapor. Kompas TV dominan menggunakan bahasa yang lebih halus saat menyuguhkan beritanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberitaan Kompas TV dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ustadz Abdul Somad ini tergolong berimbang dan tidak mewakili kepentingan golongan manapun.

Lewat beberapa penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa memang telah ada konstruksi di media. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui konstruksi seperti apa yang dibangun masing-masing media terhadap objek penelitian peneliti yaitu pada kasus pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi non muslim di SMKN 2 Padang. Bahkan, jika ada kemungkinan kepemilikan media yang turut andil dalam konstruksi, bisa diketahui ada atau tidak lewat penelitian peneliti nanti.

Sehingga peneliti mengangkat judul, *“Wacana dan Konstruksi Pemberitaan Intoleransi di Metro TV Tentang Penggunaan Jilbab Bagi Siswi Non Muslim di SMKN 2 Padang ”* untuk melihat bagaimana pembingkain berita di Metro TV.

Peneliti membatasi penelitian dengan berfokus pada kasus “pemaksaan” pemakaian jilbab terhadap siswi non-muslim di SMKN 2 Padang untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dibangun oleh Metro TV dalam menanggapi kasus intoleransi ini. Dengan kemampuan media mengkonstruksi realitas peneliti merasa tertarik untuk meneliti konstruksi yang dibangun oleh media televisi Indonesia yaitu Metro TV tentang bagaimana media ini membingkai pemberitaan tersebut.

Dalam rangka untuk mengetahui konstruksi isu tersebut, penelitian ini menggunakan analisis wacana Van Dijk dan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wacana dan konstruksi pemberitaan isu intoleransi di media televisi Metro TV?
2. Bagaimana pengaruh kekuasaan terhadap wacana pemberitaan Metro TV?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wacana dan konstruksi pemberitaan intoleransi di media televisi Metro TV.
2. Untuk mengetahui relasi kekuasaan media terhadap wacana pemberitaan Metro TV.

Martiniana Pasrin

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unj.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
4	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	1%
5	elsaonline.com Internet Source	1%
6	www.kadrun.id Internet Source	1%
7	tirto.id Internet Source	1%
8	profduski.wordpress.com Internet Source	1%
9	nasional.kompas.com Internet Source	<1%

10	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.makronesia.id Internet Source	<1 %
12	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
14	geotimes.id Internet Source	<1 %
15	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
16	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
19	Repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
20	fokus.tempo.co Internet Source	<1 %
21	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	<1 %

22	www.goodreads.com Internet Source	<1 %
23	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
25	suarajakarta.co Internet Source	<1 %
26	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
27	epdf.pub Internet Source	<1 %
28	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On